

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Alamat : Pusat Perkantoran Bukit Pelangi Jln Linmas

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Sangatta, 18 Februari 2025
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Tejo Yuwono, S.Pd
Pembina Utama Muda IVc
NIP.197309162000121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
1.2.2 Anggaran	5
1.3 Dasar Hukum	5
1.4 Sistematika Laporan Kinerja.....	6
BAB II	8
PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	8
2.2 Rencana Kinerja Tahun n	9
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
BAB III	15
AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Capaian Kinerja	15
3.1.1 Skala Capaian Kinerja.....	16
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	16
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	17
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	18
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).....	19

3.1.6	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	19
3.1.7	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	20
3.1.8	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	21
3.2	Realisasi Anggaran.....	28
BAB IV		32
PENUTUP		32
LAMPIRAN		33

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n	5
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	8
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n	9
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun n.....	9
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah.....	10
Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n.....	11
Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.7 Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja.....	16
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun n	16
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja	17
Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	18
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota	19
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi.....	19
Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	20
Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	21
Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi**Error! Bookmark not defined.**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

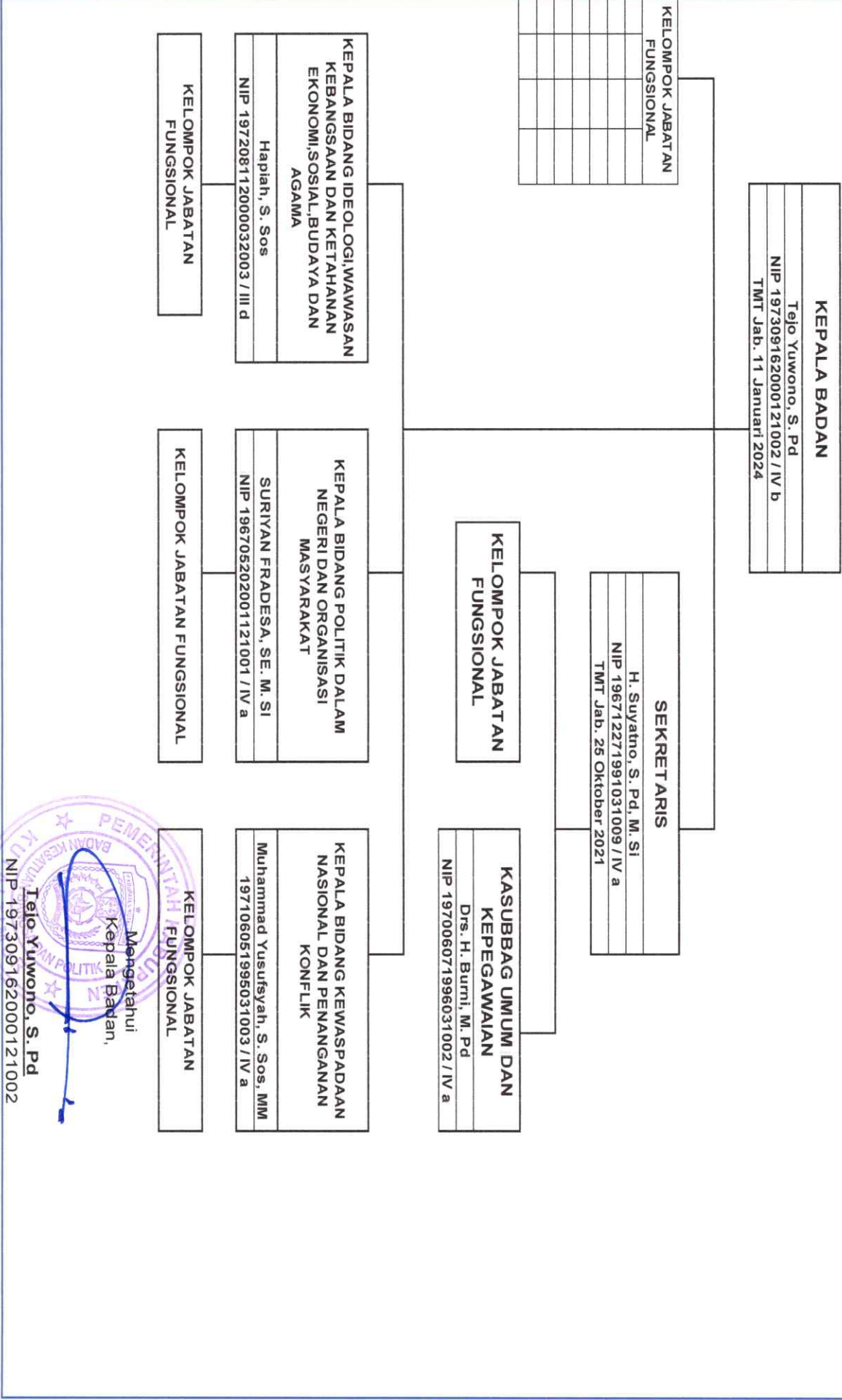
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Umum Yang Menjadi Kewenangan daerah yang di pimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah Dan bertanggung jawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Menyelenggarakan Tugas dan kewajiban tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas :

- Perumusan kebijakan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik;
- Pemberian Dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- Pembinaan dan pelaksanaan kesatuan bangsa dan politik;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berikut bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun n-1(2023)	Rp.51.242.461.271
APBD	Tahun n (2024)	Rp.101.288.691.714
Sumber Lainnya (Jika Ada)		Rp. -

Sumber : Laporan keuangan SKPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara revidi atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 26 tahun 2015 Tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara Review atas laporan kinerja di lingkungan pemerintah kabupaten kutai timur

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Menata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan Dan Akuntabel Berbasis Elektronik. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.12	Menata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik			LSM/Organisasi yang Aktif	123	139	169	199	229
		1.4.12.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Mengoptimalkan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	123	139	169	199	280

Sumber : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Periode 2021 - 2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.4. 12	Menata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	1. 4. 12 #. 1	LSM/Organisasi yang Aktif				
1.4. 12. 1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1. 4. 12 .1 #0 .1	Mengoptimalkan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Lembaga	upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan organisasi kemasyarakatan dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan organisasi kemasyarakatan dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.	Jumlah organisasi tahun sebelumnya yang terdaftar di tambah jumlah organisasi tahun berjalan	Bidang Ormas

Sumber: Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.4.12	Menata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik			LSM/Organisasi yang Aktif		199
		1.4.12.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Mengoptimalkan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Lembaga	199

Sumber : Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator Kinerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.4.12	Menata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	LSM/Organisasi yang Aktif	199
1.4.12.1	LSM Organisasi yang Aktif	Mengoptimalkan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	199

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.4.12. 1.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah organisasi masyarakat yang aktif	199
1.4.12. 1.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1
1.4.12. 1.1.1.1	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran ormas,Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di daerah	18

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.4.12. 1.1.1.2	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1
1.4.12. 1.1.1.3	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	226
1.4.12. 1.1.1.4	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	350
1.4.12. 1.1.1.5	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50
1.4.12. 1.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Laporan Keuangan	100
1.4.12. 1.2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5
1.4.12. 1.2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2
1.4.12. 1.2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2
1.4.12. 1.2.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	2
1.4.12. 1.2.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	1

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
1.4.12. 1.2.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4
1.4.12. 1.2.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	2
1.4.12. 1.2.2.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan barang milik daerah SKPD	4
1.4.12. 1.2.2.2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2
1.4.12. 1.2.3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	2
1.4.12. 1.2.3.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	39
1.4.12. 1.2.3.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	23
1.4.12. 1.2.3.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	4
1.4.12. 1.2.3.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2
1.4.12. 1.2.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian PD	2
1.4.12. 1.2.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	5
1.4.12. 1.2.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20
1.4.12. 1.2.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4
1.4.12. 1.2.5.1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1
1.4.12. 1.2.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	4
1.4.12. 1.2.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	4
1.4.12. 1.2.5.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12
1.4.12. 1.2.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.4.12. 1.2.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang di sediakan	12
1.4.12. 1.2.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	12
1.4.12. 1.2.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82
1.4.12. 1.2.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraandinas jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknya	25
1.4.12. 1.2.8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1
1.4.12. 1.2.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56
1.4.12. 1.2.9	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0
1.4.12. 1.2.9.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.3 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4.12	Menata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	LSM/Organisasi yang Aktif	199	199	100,00	Tinggi	Bidang Ormas
1.4.12.1	LSM Organisasi yang Aktif	Mengoptimalkan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	199	199	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Ormas

Sumber : Berita Acara Evaluasi Rencana Kerja 2024

Uraian penjelasan tabel :

Adanya antusias Kesadaran Organisasi masyarakat untuk Melaporkan keaktifan Organisasinya.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4. 12	Menata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	LSM/Organisasi yang Aktif	139	228	169	199	199	100
1.4. 12. 1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Mengoptimalkan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	139	228	264	199	199	100,00

Sumber : Bidang Ormas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Uraian penjelasan tabel :

Faktor Pendorong Realisasi tidak menurun di karenakan antusias organisasi yang telah Mendaftar/Melaporkan Kepengurusannya Berdasarkan periodenya, Sehingga semua Ormas mendaftarkan setiap tahunnya.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan

strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No .	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.4. 12	Menata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	LSM/Organisasi yang Aktif	199	199	100
1.4. 12. 1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Mengoptimalkan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	199	199	100,00

Sumber : Bidang Ormas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Uraian penjelasan tabel :

- Adanya Antusias Pendaftaran Ormas dari kementrian dalamNegeri,sehingga Banyak Ormas yang ikut mendaftar ketika penerbitan SKT (Surat keterangan terdaftar).
- Adanya kerja sama di bidang Ormas untuk memaksimalkan kinerja Tim Ormas.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/
Kabupaten/Kota**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.4. 12	Menata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	LSM/Organisasi yang Aktif	199		100,00
1.4. 12. 1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Mengoptimalkan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	199		100,00

Sumber : Bidang Ormas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

- Permendagri 57 tahun 2017 Tentang pendaftaran organisasi kemasyarakatan.

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4. 12	Menata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	LSM/Organisasi yang Aktif	199	199	100	Berhasil	Dengan Mengadakan Pembinaan dan Sosialisasi.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4. 12.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Mengoptimalkan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	199	199	100,00	Berhasil	Dengan Mengadakan Pembinaan dan Sosialisasi.

Sumber : Bidang Ormas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Uraian penjelasan tabel :

Adanya Antusias Kesadaran Organisasi Masyarakat untuk melaporkan keaktifan organisasinya.

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4. 12	Menata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	199	199	100	22.925.816.714	21.110.791.235	92,08	Efisien
1.4. 12. 1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	199	199	100,00	22.925.816.714	21.110.791.235	92,08	Efisien

Sumber : Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Uraian penjelasan tabel:

Adanya Faktor Pendorong Sehingga Realisasi Efisiensi salah satunya pemahaman Ormas terhadap aturan dan regulasi yang berlaku dan SDM yang cukup maksimal dan efektif untuk keberlangsungan kinerja.

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4. 12	Menata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	LSM/Organisasi yang Aktif						
1.4. 12. 1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Mengoptimalkan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah organisasi masyarakat yang aktif	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.1. 1				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	100,00	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Organisasi Kemasyarakatan	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
1.4. 12. 1.1. 1.1				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran ormas,Pember dayaan Ormas,Evalua si dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengaw asan Ormas Dan Ormas Asing Di daerah	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.1. 1.2				Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	100,00	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4. 12. 1.1. 1.3				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	72,57	Menunjang	
1.4. 12. 1.1. 1.4				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.1. 1.5				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	100,00	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
1.4. 12. 1.2				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Laporan Keuangan	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 1.1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 1.2				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 1.3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan	100,00	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					dokumen RKA-SKPD			
1.4. 12. 1.2. 1.4				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 1.5				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 2				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 2.1				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausaha n barang milik daerah SKPD	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 2.2				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100,00	Menunjang	
1.4. 12.				Administrasi Keuangan	Jumlah laporan	100,00	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2. 3				Perangkat Daerah	keuangan perangkat daerah			
1.4. 12. 1.2. 3.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 3.2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaa tugas ASN	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 3.3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaa n dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 3.4				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 4				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian PD	100,00	Menunjang	
1.4. 12.				Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah paket pakaian dinas	100,00	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2. 4.1				beserta Atribut Kelengkapannya	beserta atribut kelengkapan			
1.4. 12. 1.2. 4.2				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 5				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 5.1				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaa n arsip dinamis pada SKPD	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 5.2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 5.3				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logoistik kantor yang di sediakan	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 5.4				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggara an rapat koordinasi an konsultasi SKPD	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 7				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	100,00	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.4. 12. 1.2. 7.1				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, su mber daya air dan listrik yang di sediakan	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 7.2				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 8				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 8.1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraandina s jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknya	100,00	Menunjang	
1.4. 12. 1.2. 8.2				Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	100,00	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi			
1.4. 12. 1.2. 8.3				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100,00	Menunjang	

Sumber : Laporan realisasi fisik dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Uraian penjelasan tabel:

Berdasarkan tabel 3.8 di atas seluruh Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Menujang IKU Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4. 12. 1.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.327.000.000	8.028.507.979	96,42
1.4. 12. 1.1. 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.327.000.000	8.028.507.979	96,42

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4. 12. 1.1. 1.1	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200.000.000	183.284.819	91,64
1.4. 12. 1.1. 1.2	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100.000.000	51.002.000	51,00
1.4. 12. 1.1. 1.3	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5.975.000.000	5.770.960.800	96,59
1.4. 12. 1.1. 1.4	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.852.000.000	1.841.754.780	99,45
1.4. 12. 1.1. 1.5	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200.000.000	181.505.580	90,75
1.4. 12. 1.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.598.816.714	13.082.283.256	89,61
1.4. 12. 1.2. 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	750.000.000	739.817.972	98,64
1.4. 12.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	350.000.000	344.132.000	98,32

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.2. 1.1				
1.4. 12. 1.2. 1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50.000.000	49.366.000	98,73
1.4. 12. 1.2. 1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.000.000	98.713.200	98,71
1.4. 12. 1.2. 1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000	97.832.300	97,83
1.4. 12. 1.2. 1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	149.774.472	99,85
1.4. 12. 1.2. 2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	150.000.000	143.964.800	95,98
1.4. 12. 1.2. 2.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000	98.394.800	98,39
1.4. 12. 1.2. 2.2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	45.570.000	91,14
1.4. 12. 1.2. 3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.976.816.714	8.593.451.586	86,13

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4. 12. 1.2. 3.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.963.479.321	6.624.883.138	83,19
1.4. 12. 1.2. 3.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.063.337.393	1.028.447.548	96,72
1.4. 12. 1.2. 3.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	700.000.000	690.720.400	98,67
1.4. 12. 1.2. 3.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	250.000.000	249.400.500	99,76
1.4. 12. 1.2. 4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	590.330.000	585.634.094	99,20
1.4. 12. 1.2. 4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	150.000.000	149.595.000	99,73
1.4. 12. 1.2. 4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	440.330.000	436.039.094	99,03
1.4. 12. 1.2. 5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.468.849.040	1.454.956.050	99,05
1.4. 12.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	300.849.040	295.851.950	98,34

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.2. 5.1				
1.4. 12. 1.2. 5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	278.000.000	270.222.700	97,20
1.4. 12. 1.2. 5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000	149.327.300	99,55
1.4. 12. 1.2. 5.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	740.000.000	739.554.100	99,94
1.4. 12. 1.2. 7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.000.000	458.037.595	83,28
1.4. 12. 1.2. 7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000	208.717.895	69,57
1.4. 12. 1.2. 7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	250.000.000	249.319.700	99,73
1.4. 12. 1.2. 8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.112.820.960	1.106.421.159	99,42
1.4. 12. 1.2. 8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000	195.861.950	97,93

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4. 12. 1.2. 8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	712.820.960	710.806.709	99,72
1.4. 12. 1.2. 8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000	199.752.500	99,88

Sumber : Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Uraian penjelasan tabel:

Dari Tabel 3.9 di atas rata-rata Capaian Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Mencapai 99,74 %.Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 nilai 99,74% Termasuk Kategori Capaian sangat tinggi.

BAB IV

PENUTUP

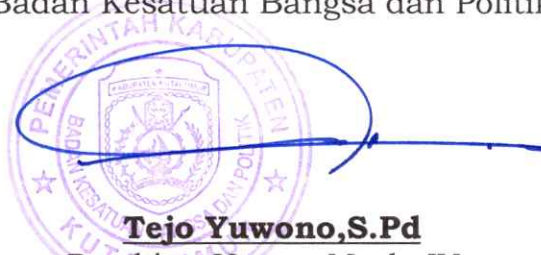
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 4 sasaran strategis dengan 4 sasaran strategis tercapai dan 0 sasaran strategis tidak tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Tidak ada karena semua telah berjalan sesuai rencana kerja tahun 2024 dan sejalan dengan realisasi kegiatan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Sangatta, 18 Februari 2025
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Tejo Yuwono, S.Pd
Pembina Utama Muda IVc
NIP.197309162000121002